

DAMPAK UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) TERHADAP PENGANGGURAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI SEKTOR DOMESTIK DAN LUAR NEGERI

Fiorella Amelia Shafira
Universitas Muhammadiyah Malang

Correspondence		
Email: shafirafiorella@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 11 Juni 2024	Accepted 14 Juni 2024	Published 21 Juni 2024

ABSTRACT

The growth rate of the development index in a region can also be measured by the development of the Regional Minimum Wage (UMR). Developments in the UMR over time will have an impact on increasing income. The author's aim in writing this article is to determine the influence of the Regional Minimum Wage (UMR) on the unemployment rate and recruitment of TKI in the domestic and overseas sectors and to find out how the implementation of the UMR affects the welfare of TKI in the domestic and overseas sectors. The research method used by the author is descriptive analytical research which combines quantitative and qualitative approaches. The basic problem that often occurs in employment is low regional minimum wages which directly or indirectly have an impact on unemployment. In the domestic sector, the implementation of the UMR encourages increased legal protection for domestic workers, thus attracting more workers to join this sector. On the other hand, in the overseas sector, the UMR provides a clearer framework for the protection of migrant workers in destination countries, reducing the risk of exploitation and abuse.

Keywords: Indonesian Economic Growth, Worker Welfare, Unemployment, Regional Minimum Wage

ABSTRAK

Tingkat pertumbuhan indeks pembangunan pada suatu daerah juga dapat diukur dengan perkembangan Upah Minimum Regional (UMR). Perkembangan UMR dari waktu ke waktu akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan. Tujuan penulis menulis artikel ini adalah untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap tingkat pengangguran dan perekrutan TKI di sektor domestik dan luar negeri serta mengetahui bagaimana implementasi UMR mempengaruhi kesejahteraan TKI di sektor domestik dan luar negeri. Metode penelitian yang digunakan penulis penelitian deskriptif analitis yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Permasalahan mendasar yang sering terjadi dalam ketenagakerjaan adalah upah minimum regional yang rendah yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pengangguran. Di sektor domestik, implementasi UMR mendorong peningkatan perlindungan hukum bagi pekerja domestik, sehingga menarik lebih banyak pekerja untuk bergabung di sektor ini. Di sisi lain, di sektor luar negeri, UMR memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi perlindungan TKI di negara tujuan, mengurangi risiko eksploitasi dan penyalahgunaan.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Kesejahteraan Pekerja, Pengangguran, Upah Minimum Regional

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk tersebut terutama bagi penduduk di usia produktif tentunya berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Arsyad (2004) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat di negara-negara berkembang dapat mengakibatkan berbagai masalah dalam upaya pembangunan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang cepat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang signifikan, sementara kemampuan negara tersebut untuk menyediakan lapangan pekerjaan baru sangat terbatas. Misalnya, lulusan perguruan tinggi dan individu yang kurang berpendidikan seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan.

Kini Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan dalam bidang kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial. Tyas (2020) menyatakan bahwa walaupun terdapat sumber

daya yang melimpah dari alam dan besarnya populasi tenaga kerja, Indonesia masih belum bisa berkembang secepat yang diinginkan. Malah jumlah ketersediaan tenaga kerja yang besar tersebut menimbulkan masalah baru yaitu pengangguran. Pada tahun 2023, perekonomian Indonesia menghadapi berbagai kesulitan. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 5,05% dari 5,31% di tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk yang besar, persebaran penduduk yang tidak merata dan minimnya lapangan pekerjaan menyebabkan masyarakat Indonesia memilih untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Pengertian inilah yang merujuk pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik laki-laki maupun perempuan yang tersebar di beberapa negara. Hingga kini pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri masih berlangsung, dikarenakan permintaan yang tinggi dari negara-negara maju di sekitar Asia seperti Taiwan, Singapura, Brunei, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia serta besarnya gaji yang ditawarkan.

Salah satu masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran.¹ Negara yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi menandakan ketidakmampuannya dalam menghasilkan pekerjaan lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan jumlah pencari kerja yang sangat besar. Kondisi ini bisa menjadi penyebab utama kemiskinan dan hambatan dalam pembangunan. Tingkat pengangguran dihitung dengan membandingkan jumlah penganggur dengan total angkatan kerja, yang dinyatakan dalam persen.² Kurangnya pendapatan akibat pengangguran juga memaksa penganggur untuk memotong pengeluaran konsumsi mereka, yang berakibat pada penurunan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berlangsung lama juga dapat menyebabkan dampak psikologis negatif pada penganggur maupun keluarga mereka sehingga berdampak pada kesejahteraan kehidupan masyarakat. Menurut Suryawati (2005), tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan masalah kemiskinan. Dalam konteks ekonomi, kemiskinan berarti ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini mencakup kekurangan pendapatan atau sumber daya ekonomi yang cukup untuk keperluan seperti makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, dan kebutuhan lainnya.

Selain itu, dengan jumlah TKI yang signifikan bekerja di luar negeri, kebijakan UMR di dalam negeri dan peraturan upah minimum di negara tujuan menjadi penting. TKI sering mengalami kesenjangan upah dan kondisi kerja yang berbeda, yang mempengaruhi kehidupan mereka dan ekonomi Indonesia. Kebijakan upah minimum di negara tujuan, seperti Taiwan, Singapura, atau Malaysia, dapat memengaruhi tingkat penghasilan TKI serta kontribusi mereka terhadap perekonomian Indonesia. Penyesuaian upah minimum di negara tujuan dengan biaya hidup setempat juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan TKI dan mengurangi ketimpangan upah antara TKI dan pekerja lokal, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada perekonomian domestik Indonesia.

Stligisz dan Shapiro (1998), seperti yang dikutip oleh Syafitri (2002), menyatakan bahwa peningkatan upah juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Faktor upah adalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Di Indonesia, regulasi mengenai upah diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. UMR yang ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai standar minimum gaji yang harus dibayarkan oleh perusahaan masih tergolong rendah. Penetapan Umr di Indonesia seringkali tidak sebanding dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Hal ini menyebabkan banyak pekerja, terutama di sektor informal, menerima upah yang jauh

¹ SyahrinaSyam, Abdul Wahab, Op.Cit. h.36.

² Muhammad Nurholes. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2014". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 No. 1 (Juni, 2014).

di bawah standar minimum. Upah yang rendah ini berakibat pada kesejahteraan pekerja di Indonesia dan tingginya tingkat pengangguran. Pekerja dengan upah rendah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Serta pekerja dengan upah rendah memiliki akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, pekerja dengan upah rendah juga rentan terhadap eksploitasi oleh perusahaan. Kondisi ini memperparah kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia.

Oleh karena itu, memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menangani masalah pengangguran dan kemiskinan adalah esensial untuk mengidentifikasi solusi yang efektif. Mengingat pengangguran dan upah rendah mempengaruhi tidak hanya kemampuan ekonomi individu tetapi juga kesehatan sosial ekonomi negara secara keseluruhan, diperlukan sebuah pendekatan yang komprehensif. Pendekatan tersebut harus mencakup kebijakan pemerintah yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta reformasi dalam kebijakan pengupahan yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Upah Minimum Regional (UMR) terhadap tingkat pengangguran dan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia, baik dalam sektor domestik maupun luar negeri, serta mengusulkan strategi yang dapat meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan mengurangi kesenjangan sosial. Melalui analisis yang mendalam, studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya mengatasi gejala tetapi juga akar permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap tingkat pengangguran dan perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sektor domestik dan luar negeri?
2. Bagaimana implementasi UMR mempengaruhi kesejahteraan TKI di sektor domestik dan luar negeri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap tingkat pengangguran dan perekrutan TKI di sektor domestik dan luar negeri.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi UMR mempengaruhi kesejahteraan TKI di sektor domestik dan luar negeri.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadinya perkembangan GNP yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat (Murni, 2006). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Indikator perekonomian seperti tingkat pengangguran sangat penting untuk menilai kemajuan atau kemunduran suatu negara dalam bidang ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi seringkali menjadi tanda adanya masalah dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif seperti kemiskinan, ketegangan sosial, dan peningkatan tingkat kejahatan yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang (Blanchard, 2009).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor yang utama dalam menilai kinerja suatu perekonomian. Ekonomi dapat disebut mengalami pertumbuhan apabila

produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan tambahan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat menandakan perkembangan yang positif dalam perekonomian suatu negara atau wilayah (Alghofari, 2010).

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam menilai kesuksesan pembangunan suatu negara, terutama dalam konteks ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat regional. Selain dipengaruhi oleh faktor internal, pertumbuhan ekonomi negara juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya dalam era globalisasi ekonomi. Secara internal, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor krusial yang memengaruhi permintaan tenaga kerja, baik secara nasional maupun di tingkat wilayah atau daerah. Pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sejak awal munculnya ilmu ekonomi, pertumbuhan ekonomi telah menjadi fokus utama perhatian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nanga (dalam Fretes, 2007), pertumbuhan ekonomi merupakan elemen penting dan merupakan sumber primer dalam meningkatkan standar hidup penduduk yang terus bertambah jumlahnya. Artinya, kemampuan suatu negara untuk meningkatkan standar hidup masyarakatnya sangat bergantung pada laju pertumbuhan ekonominya dalam jangka panjang.

2. Konsep Pengangguran

2.1 Definisi Pengangguran

Pengangguran atau tunakarya, merujuk pada individu yang tidak sedang bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan. Hal ini sering terjadi ketika jumlah orang yang mencari pekerjaan melebihi jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Menurut Thomas Carlyle pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan, yang mungkin menandakan ketidakadilan yang paling menyedihkan dalam masyarakat. Pengangguran merupakan masalah ekonomi yang memiliki dampak tidak langsung yang sangat berat pada manusia. Bagi banyak orang, kehilangan pekerjaan berarti menurunnya kualitas hidup dan tekanan mental yang besar.³ Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

2.2 Tingkat Pengangguran

Populasi suatu negara bisa dibagi menjadi dua kelompok utama berdasarkan usia, yakni penduduk usia kerja yang berusia antara 15 hingga 64 tahun, dan kemudian kelompok non-usia kerja yang mencakup anak-anak (0-14 tahun) serta orang tua (di atas 65 tahun). Dalam kelompok usia kerja, hanya sebagian yang aktif untuk mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja tergolong dalam angkatan kerja. Namun, tidak semua dari mereka berhasil mendapatkan pekerjaan. Individu dari

³ Sadono sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Tiga* (Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2013), h.366.

angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan inilah yang disebut sebagai pengangguran. Sementara itu, mereka yang memilih untuk tidak bekerja karena alasan tertentu, seperti pendidikan atau lainnya, tidak dihitung sebagai bagian dari angkatan kerja.⁴

Tingkat pengangguran menggambarkan persentase dari total angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan. Lebih penting untuk memfokuskan pada tingkat pengangguran daripada jumlah pengangguran absolut karena persentase ini memberikan pemahaman yang lebih akurat mengenai masalah pengangguran di berbagai negara. Membandingkan hanya jumlah pengangguran antar negara tidak efektif karena tidak mencerminkan skala sebenarnya dari masalah tersebut.

Data ketenagakerjaan memungkinkan penghitungan berbagai konsep yang terkait dengan tingkat pekerjaan dan pengangguran, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), tingkat pekerjaan, dan tingkat pengangguran. Informasi ini sangat penting untuk memahami kondisi pasar tenaga kerja saat ini. Kepahaman ini tidak hanya vital untuk pembuatan kebijakan ketenagakerjaan, tetapi juga untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.⁵

2.3 Jenis-jenis Pengangguran

a. Pengangguran menurut pengertiannya dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

a) Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka merujuk pada individu di dalam angkatan kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan, termasuk mereka yang telah berusaha keras tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang tidak bekerja karena malas.

b) Pengangguran Terselubung

Pengangguran terselubung terjadi ketika terdapat lebih banyak pekerja daripada yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan, sehingga pengurangan jumlah pekerja tidak mempengaruhi output produksi. Jenis pengangguran ini juga bisa berarti seorang pekerja yang tidak bekerja sesuai dengan bakat atau kemampuannya, sehingga kinerjanya tidak maksimal.

c) Setengah Menganggur

Setengah menganggur diartikan sebagai tenaga kerja yang tidak dapat bekerja secara maksimal karena kekurangan pekerjaan yang bersifat sementara. Menurut pendapat lain, setengah menganggur juga bisa merujuk pada individu yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau kurang dari 7 jam per hari.⁶

b. Pengangguran menurut penyebab. Menurut Iskandar Putong pengangguran terdiri dari jenis-jenis berikut:

a) Pengangguran Siklis

Pengangguran siklis terjadi ketika permintaan dalam ekonomi lebih rendah dari pada potensi output yang bisa dihasilkan.

b) Pengangguran Friksional

⁴ Pratama Raharja, Mandala Marunung, Pengantar Ilmu Ekonomi Edisi Ketiga (Jakarta: fakultas ekonomi Indonesia, 2008), h.379.

⁵ Dumairy, Perekonomian Indonesia (Jakarta: Erlangga, 1996), h.79.

⁶ Riska Franita, "Analisis Pengangguran di Indonesia". Jurnal ilmu sosial, vol. 1, (Desember 2015).

Pengangguran friksional adalah hasil dari perubahan dan pergerakan dalam pasar tenaga kerja.

c) Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi karena ketidaksesuaian antara karakteristik tenaga kerja, seperti pendidikan dan keterampilan, dengan struktur pekerjaan yang ada. Ini bisa melibatkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, industri, lokasi geografis, informasi, dan juga permintaan tenaga kerja yang ada.⁷

2.4 Dampak Pengangguran

a. Pengangguran berpengaruh terhadap perekonomian

Setiap negara selalu melakukan usaha untuk memaksimalkan kemakmuran hidup penduduknya dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil serta berkelanjutan.⁸ Tingkat pengangguran yang tinggi menghambat pencapaian terhadap potensi tenaga kerja, yang tercermin dalam dampak negatif ekonomi yang ditimbulkannya.⁹ Akibat buruk pengangguran terhadap perekonomian (Samuelson, h. 326) adalah:

- a) Pengangguran mengakibatkan masyarakat tidak dapat mencapai tingkat kesejahteraan maksimal yang potensial. Kondisi ini membuat output aktual yang dihasilkan lebih rendah daripada output yang seharusnya bisa dicapai, sehingga tingkat kemakmuran yang diperoleh juga lebih rendah dari yang seharusnya.
- b) Tingginya tingkat pengangguran, yang sering terjadi akibat aktivitas ekonomi yang rendah, mengakibatkan penurunan penerimaan pajak pemerintah. Hal ini, pada gilirannya, mengurangi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan.¹⁰
- c) Tingkat pengangguran yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena tidak mendorong perusahaan untuk berinvestasi di masa depan.

Berdasarkan tiga penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengangguran menghalangi pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Pengangguran berpengaruh terhadap individual

Selain berdampak negatif pada perekonomian secara umum, pengangguran juga menimbulkan berbagai masalah bagi individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak tersebut:¹¹

- a) Pengangguran mengakibatkan hilangnya mata pencaharian dan pendapatan. Di negara-negara maju, orang-orang yang menganggur sering kali mendapatkan tunjangan dari program asuransi pengangguran, sehingga

⁷ Iskandar Putong, *Ekonomi Makro, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, vol. 1, (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2003), h.169

⁸ Panjawa, Jihad I. dan D Soebagiyo. 2014. *Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 15, Nomor 1, April 2014, hal. 48-54: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁹ Cahyani, Indah Gita. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Di Sulawesi Selatan*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

¹⁰ Santoso, Singgih. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik*. Jakarta; PT. Alex Media Komputindo. hal. 30-32.

¹¹ Cahyani, Indah Gita. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Di Sulawesi Selatan*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

masih memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Namun, di negara-negara berkembang, program asuransi seperti ini seringkali tidak ada.¹²

- b) Pengangguran bisa menyebabkan kehilangan atau penurunan keterampilan karena kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan hanya bisa dipertahankan melalui penggunaan praktis dari keterampilan tersebut.
- c) Pengangguran juga dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Aktivitas ekonomi yang stagnan dan tingkat pengangguran yang tinggi sering kali menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa.

3. Kesejahteraan Pekerja

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera itu berarti aman sentosa dan makmur. Sementara itu kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seorang manusia merasa hidupnya sejahtera.¹³ Dengan mengacu pada masyarakat atau kehidupan yang sejahtera, kita dapat lebih memahami konsep tersebut melalui pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat. Rasa sejahtera muncul ketika individu merasa bebas dari ketakutan, tekanan, kemiskinan, dan memiliki akses yang cukup terhadap barang, jasa, serta kesempatan.¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, memungkinkan mereka untuk hidup layak dan berkembang serta melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁵

Pada dasarnya pengertian buruh dan pekerja adalah sama, pekerja adalah setiap orang yang mampu bekerja, buruh itu termasuk pekerja, hanya saja pengertian pekerja lebih luas daripada buruh. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk-bentuk lain. Menurut I.G. Wursanto (1985:165) Kesejahteraan karyawan atau jaminan sosial merupakan bentuk pemberian penghasil baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk non materi, yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan untuk selama masa pengabdianya ataupun setelah berhenti karena pensiun, lanjut usia dalam usaha memenuhi kebutuhan materi maupun non materi kepada karyawan dengan tujuan untuk memberikan semangat atau dorongan kerja kepada karyawan.

4. Upah Minimum Regional

Pemerintah di berbagai negara berupaya melindungi para pekerja, terutama buruh, dalam hubungan kerja dengan pengusaha dengan menetapkan tingkat upah minimum regional (UMR). UMR ini disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen, kemampuan perusahaan, dan perkembangan regional. Namun, UMR sebaiknya tidak terlalu tinggi agar tidak memicu pengangguran karena pengusaha akan lebih berhati-hati dalam memilih tenaga kerja.¹⁶ Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan, upah adalah kompensasi yang diberikan oleh pengusaha kepada buruh sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Besarannya ditetapkan dalam bentuk uang berdasarkan persetujuan atau

¹² Jhingan, 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta, rajawali Press. hal. 230-232.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 270.

¹⁴ Sarbini, Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 99

¹⁵ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

¹⁶ Suparmoko, *Pengantar Ekonomika Makro*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 184-185

peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh, termasuk tunjangan untuk buruh dan keluarganya.¹⁷

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 1 butir 30, upah adalah hak yang diterima oleh pekerja atau buruh dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Besarannya ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁸

Pemerintah turut campur dalam pengaturan upah karena penting untuk menyeimbangkan antara penghasilan yang mencukupi untuk hidup layak dan produktivitas kerja. Kebijakan penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan minimum, yang awalnya berupa kebutuhan fisik dan berkembang menjadi kebutuhan hidup minimum secara regional. Tujuannya adalah sebagai perlindungan sosial, untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok yang paling rentan, memperluas kesetaraan pendapatan, dan mengatur pembayaran upah di atas upah minimum secara internal di perusahaan.¹⁹ Implementasi UMR di tingkat regional di Indonesia memerlukan pendekatan yang cermat. Perbedaan kondisi ekonomi dan sosial antar-daerah menimbulkan tantangan dalam menetapkan tingkat UMR yang tepat. Perbandingan dengan upah minimum nasional juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa UMR tidak terlalu jauh dari standar nasional sehingga tidak mengganggu keseimbangan ekonomi secara keseluruhan.

Keberlanjutan kebijakan UMR dalam mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan TKI memerlukan evaluasi terus-menerus. Perlu diperhatikan apakah UMR telah efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf hidup pekerja. Selain itu, dampak UMR terhadap daya saing perusahaan dan investasi juga perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, perumusan dan implementasi kebijakan UMR harus memperhatikan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan keberlanjutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data statistik terkait tingkat pengangguran, kesejahteraan pekerja, dan penetapan Upah Minimum Regional (UMR) di sektor domestik dan luar negeri. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang mempengaruhi implementasi UMR serta dampaknya terhadap pengangguran dan kesejahteraan pekerja.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait. Data primer yang digunakan mencakup data-data terkait UMR dan statistik pengangguran di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2023, yang diperoleh dari lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan lembaga statistik nasional. Selain itu, data sekunder yang relevan juga diambil dari literatur terkait yang membahas topik terkait,

¹⁷ Aloysius Uwiyono, Siti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, Melania Kiswandari, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 99-100.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 100.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 100-101.

seperti pengaruh kebijakan upah terhadap tingkat pengangguran dan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Analisis data dilakukan melalui metode statistik deskriptif untuk mengidentifikasi tren dan pola yang relevan dalam data. Dalam melakukan analisis regresi, penulis menggunakan teknik-teknik statistik untuk mengevaluasi sejauh mana variabel-variabel seperti penetapan UMR, tingkat pengangguran, dan kesejahteraan pekerja saling berhubungan. Langkah-langkah kontrol kualitas data yang ketat penulis terapkan meliputi pemeriksaan konsistensi, identifikasi outliers, dan eliminasi data yang tidak lengkap atau tidak relevan. Ini memastikan bahwa hasil analisis ini didasarkan pada data yang konsisten, akurat, dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap tingkat pengangguran dan perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sektor domestik dan luar negeri

Permasalahan mendasar yang sering terjadi dalam ketenagakerjaan adalah upah minimum regional yang rendah yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pengangguran. Hal ini dikarenakan peningkatan tenaga kerja baru lebih banyak dibandingkan lapangan pekerjaan yang tersedia tiap tahun (Ryan dkk, 2017). Menurut Seran (2017), tenaga kerja cenderung memilih untuk menganggur karena tingkat upah yang ditetapkan rendah. Kaufman dan Hotchkiss (2000) menyebutkan bahwa tujuan adanya kebijakan upah minimum adalah agar dapat memenuhi standar hidup pekerja.

Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional (Kusnaini, 1998). Upah merupakan unsur terpenting yang berpengaruh terhadap kehidupan pekerja karena upah menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya baik berupa sandang, pangan, perumahan maupun kebutuhan lain. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansur, dkk (2014) yang menemukan bahwa tingkat upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran

Di sektor domestik, implementasi UMR mendorong peningkatan perlindungan hukum bagi pekerja domestik, sehingga menarik lebih banyak pekerja untuk bergabung di sektor ini. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran di dalam negeri karena pekerja domestik memiliki lebih banyak opsi pekerjaan yang aman dan terjamin hak-haknya.

Di sisi lain, di sektor luar negeri, UMR memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi perlindungan TKI di negara tujuan, mengurangi risiko eksploitasi dan penyalahgunaan. Namun, dalam beberapa kasus, implementasi UMR juga dapat mempengaruhi perekrutan TKI di luar negeri dengan menetapkan standar yang lebih tinggi untuk agen perekrut dan majikan, sehingga memperlambat proses perekrutan. Meskipun demikian, UMR juga dapat membantu meningkatkan reputasi TKI di pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan perlindungan yang diberikan. Secara keseluruhan, pengaruh UMR terhadap pengangguran dan perekrutan TKI di sektor domestik dan luar negeri menciptakan dampak yang beragam, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi TKI di berbagai sektor pekerjaan.

2. Implementasi UMR dalam mempengaruhi kesejahteraan TKI di sektor domestik dan luar negeri

Tingkat pertumbuhan indeks pembangunan pada suatu daerah juga dapat diukur dengan perkembangan Upah Minimum Regional (UMR). Perkembangan UMR dari waktu ke waktu akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan. Keadaan tersebut akan dapat berakibat

pada kemampuan para pekerja untuk meningkatkan konsumsi pembelanjaan, dan pada akhirnya terjadi peningkatan ekonomi secara agregat, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan UMR akan dapat berefek pada IPM (Kiha et al., 2021). Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud jika pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, yang akan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak (Amrullah, 2022).

Implementasi Undang-Undang mengenai UMR (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017) sangat penting dalam mempengaruhi kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik di sektor domestik maupun luar negeri. UMR memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi TKI, termasuk dalam hal hak-hak kerja, upah, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan dari eksploitasi. Selain itu, implementasi UMR juga dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara tujuan, sehingga meningkatkan keamanan dan kesejahteraan TKI di luar negeri.

KESIMPULAN

Permasalahan mendasar yang sering terjadi dalam ketenagakerjaan adalah upah minimum regional yang rendah yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pengangguran. Di sektor domestik, implementasi UMR mendorong peningkatan perlindungan hukum bagi pekerja domestik, sehingga menarik lebih banyak pekerja untuk bergabung di sektor ini. Di sisi lain, di sektor luar negeri, UMR memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi perlindungan TKI di negara tujuan, mengurangi risiko eksploitasi dan penyalahgunaan. Tingkat pertumbuhan indeks pembangunan pada suatu daerah juga dapat diukur dengan perkembangan Upah Minimum Regional (UMR). Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat melakukan penelitian secara komprehensif dan multidimensi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh UMR terhadap pengangguran dan kesejahteraan TKI di sektor domestik dan luar negeri, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan kondisi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8 (03).
- Syafitri, W. (2002). Analisis Determinan Produktivitas dan Upah pada Sekto Manufaktur Indonesia. *Tema*, 3(1), 94-108.
- Tyas, D. C. (2020). *Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Alpri.
- Samuelson, P.A dan W. Nordhaus. 2001. Ilmu Makro Ekonomi. Edisi 17. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Blanchard, Olivier. 2009. *Macroeconomics*. Pearson Prentice Hall. United States of America.
- Alghofari, Farid. 2010. *Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007*. Undip. Semarang.
- Wursanto, I.G. 1985. *Manajemen Kepegawaian 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Arsyad, Lincoln, 2004. *Ekonomi Pembangunan*, edisi 4, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Murni, Asfia. 2006. *Ekonomi Makro*. Bandung. Refika Aditama.
- Amrullah, R. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Anggaran Sektor Kesehatan Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se- Kabupaten di Pulau Madura. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 6(1), 90–98.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Seuk, G. (2021). Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Regional terhadap Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Invest: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 41–56.

Ryan Z, R. Achmad, Nanik Istiyani dan Anifatul Hanim. (2017). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Angkatan Kerja dan Upah Minimum Regional Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur*. E-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 4(2), 187-191